BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Struktur Modal

Struktur Modal merupakan perbandingan antara sumber jangka panjang perusahaan yang ditunjukan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal senidiri.

Struktur modal juga dapat didefinisikan sebagai proporsi pendanaan permanen jangka panjang perusahaan yang diwakili oleh hutang, saham preferen, dan ekuitas saham biasa.

Fahmi (2015 : 184) menjelaskan bahwa Struktur Modal merupakan gambaran dari bentuk proporsisi finansial perusahaan yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka panjang (Long-Term Liabilities) dan modal sendiri (Shareholder's Equity) yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan.

Dari hasil pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan struktur modal adalah proporsi untuk memenuhi kebutuhan belanja pada perusahaan, dimana dana yang diperoleh menggunakan kombinasi atau panduan sumber dana jangka panjang yang terdiri dari dua sumber utama, yaitu yang berasal dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan.

2.1.2 Rasio Struktur Modal

Weston dan Copeland mengungkapkan tentang suatu konsep yang mendorong faktor *leverage* digunakan rasio proksi dalam struktur modal. Faktor *laverage* yaitu rasio antara nilai buku seluruh hutang (debt = D) terhadap total aktiva (total aset = TA) atau nilai total aset perusahaan. Yaitu dengan membahas

mengenai total aktiva, adapun yang dimaksud dengan aktiva adalah total nilai buku dari aktiva perusahaan berdasarkan catatan Akuntansi. Total Nilai Perusahaan berarti total nilai pasar seluruh komponen struktur modal perusahaan.

Rasio *leverage* adalah rasio yang digunakan dalam mengukur layak atau tidaknya struktur permodalan yang ada dalam perusahaan. Struktur permodalan adalah pendanaan permanen yang terdiri dari hutang jangka panjang, saham preferent dan modal pemegang saham.

2.1.3 Komponen Struktur Modal

Struktur modal terhadap suatu perusahaan terdiri dari dua komponen, yaitu hutang jangka panjang dan modal sendiri, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Hutang Jangka Panjang (Long Term Debt)

Hutang jangka panjang meliputi pinjaman dari bank atau sumber lain yang meminjamkan uang dalam kurun waktu tertentu yang telah ditentukan lebih dari 12 bulan. Dalam pinjaman hutang jangka panjang dapat berupa pinjaman berjangka (pinjaman yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja permanen atau melunasi hutang lain dan membeli mesin atau peralatan) dan penerbitan obligasi (hutang yang diperoleh melalui penjualan yang berupa surat obligasi, dalam surat obligasi dapat diperoleh melalui nilai nominal dalam jangka waktu pelunasan obligasi tersebut).

2. Modal Sendiri (*Equity*)

Modal sendiri atau yang disebut ekuisitas merupakan modal jangka panjang yang dapat diperoleh dari pemilik perusahaan atau pemegang saham. Modal sendiri diharapkan tetap berada dalam suatu perusahaan dalam jangka waktu yang tidak terbatas sedangkan modal pinjaman memiliki nilai jatuh tempo yang telah ditentukan. Ada 2 (dua) sumber utama yang diperoleh dari modal sendiri yaitu modal saham preferent dan modal saham biasa. Modal preferen dan modal saham meliputi :

A. Modal Saham Preferent

Saham preferen dapat memberikan para pemegang saham untuk memiliki beberapa hak atau keistimewaan yang menjadikannya lebih di perioritaskan dari pada pemegang saham biasa. oleh sebab itu perusahaan tidak dapat memberikan saham preferent dalam jumlah yang cukup banyak.

b. Modal Saham Biasa

Pemilik perusahaan adalah pemegang saham biasa yang dapat menginvestasikan uangnya melalui harapan untuk mendapat pengembalian dimasa yang akan datang. Pemegang saham biasa sering disebut juga dengan pemilik residual sebab mereka hanya menerima sisa setelah seluruh tuntutan atas pendapatan dana dapat dipenuhi.

2.1.4 Teori Struktur Modal

Teori mengacu pada struktur modal modern berawal ketika Profesor Franco Modogiliani dan Profesor Marton Miller (yang biasa dapat disebut MM), Mempublikasikan yang disebut sebagai artikel keuangan yang dapat berpengaruh terhadap penulis. Berdasarkan asumsi yang sangat terbatas, MM dapat membuktikan bahwa suatu nilai pada perusahaan tidak dipengaruhi oleh stuktur modalnya. Dengan perkiraan lain, hasil yang diperoleh MM mengungkapkan bahwa tidak menjadi masalah untuk perusahaan membiayai operasinya pada struktur modal yang tidak relevan. Tetapi studi MM didasarkan pada jumlah asumsi yang tidak realistis, antara lain sebagai berikut:

- a. Hilangnya biaya *broker* (pialang)
- b. Hilangnya pajak
- c. Tidak ada biaya kebangkrutan
- d. Para investor dapat meminjam dengan tingkat suku bunga yang sebanding seperti manajemen untuk mengenai peluang investasi pada perusahaan dimasa yang akan datang.
- e. EBIT tidak dipengaruhi oleh penggunaan utang.

Menurut Brigham dan Houston (2015), dari berbagai asumsi ini terlihat tidak realistis, hasil yang di peroleh MM tidak cukup relevan . Dengan menunjukan kondisi dimana struktur modal tidak relevan, MM juga memberikan beberapa petunjuk tentang apa yang dapat diperlukan bagi struktur modal agar terjadi relevan sehingga dapat mempengaruhi nilai suatu perusahaan. Hasil kerja MM menandai awal dari riset atas struktur modal modern, dan riset selanjutnya dipusatkan untuk melemahkan asumsi – asumsi MM dalam upaya mengembangkan teori struktur modal yang lebih realistis. Riset dalam bidang ini sangat luas, tetapi garis besarnya diringkaskan dalam bagian berikut.

1. Pengaruh Pajak

MM menerbitkan makalah lanjutan yang dapat melemahkan asumsi yang tidak ada pajak perseroan. Peraturan perpajakan dapat memperbolehkan pengurangan atau pembayaran bunga sebagai beban, tetapi pembayaran dividen kepada pemegang saham tidak dapat dikurangkan. Perbedaan ini dapat mendorong perusahaan untuk menggunakan utang dalam struktur modal. MM memperlihatkan bahwa jika semua asumsi yang lain berlaku, perbedaan perlakuan ini menyebabkan suatu situasi yang memerlukan pembelajaran dengan 100 persen utang. Akan tetapi kesimpulan bisa dapat dirubah beberapa tahun kemudian oleh Marton Miller (kali ini tanpa Modigiliani) ketika MM membahas tentang efek dari pajak perorangan. MM menyatakan bahwa semua pendapatan dari hasil obligasi pada umumnya adalah bunga. Yang dapat dikenakan sebagai pajak penghasilan perorangan pada tarif yang mencapai 39.6 persen. Sementara penghasilan dari saham biasa sebagian dapat berasal dari dividend dan sebagian dari keuntungan modal berikutnya. Keuntungan yang diperoleh dari modal biasa dikenakan pajak dengan tarif efektif yang lebih rendah dari pada pengembalian atas utang. Karena situasi dari pajak ini Miller berpendapat bahwa investor bersedia menerima pengembalian atas saham sebelum pajak yang relative rendah dibandingkan dengan pengembalian atas obligasi

sebelum pajak. Seperti yang dikemukakan Miller dapat dikurangkannya bunga untuk tujuan pajak yang menguntungkan penggunaan pembiayaan dengan utang, tetapi perlakuan pajak yang dapat melebihi atau apat menguntungkan atas penghasilan dari saham menurunkan tingkat pengembalian yang dapat diisyaratkan pada saham dan dengan demikian menguntungkan penggunaan pembelanjaan dengan ekuitas.

2. Pengaruh Biaya Kebangkrutan

Menurut Brigham dan Houston (2015) masalah yang dapat berkaitan dengan kebangkrutan semakin cenderung muncul apabila suatu perusahaan menyertakan lebih banyak utang dalam struktur modalnya oleh karena itu biaya kebangkrutan dapat menghalangi perusahaan yang menggunakan utang berlebihan. Biaya yang terkait dengan kebangkrutan mempunyai dua komponen. Probabilitas akan terjadi apabila biaya yang timbul apabila kesulitan keuangan telah muncul. Perusahaan yang labanya lebih akan dapat menghadapi peluang kebangkrutan yang lebih besar sehingga harus menggunakan lebih sedikit utang dari pada perusahaan yang stabil.

3. Trade-Off Theory

Argumen – argument terdahulu mengarah pada perkembangan yang disebut dengan teori *trade-off* dari *leverage*, di mana perusahaan menyeimbangkan manfaat dari pendanaan dengan utang (perlakuan pajak perseroan yang menguntungkan) dengan suku bunga dan biaya kebangkrutan yang lebih tinggi.

4. Teori Pengisyaratan

Dalam bukunya yang berjudul Manajemen Keuangan, Brigham dan Houston (2015) menyatakan bahwa MM mengasumsikan bahwa investor memiliki informasi yang sama mengenai prospek perusahaan seperti yang dimiliki para manajer. Ini disebut dengan kesamaan informasi (asymmetric information). Akan tetapi, dalam kenyataannya manajer mempunyai informasi yang lebih baik dari pada investor luar. Hal ini disebut ketidaksamaan informasi (asymmetric information) dan ini sangat berpengaruh terhadap keputusan struktur modal yang optimal.

2.1.5 Faktor – factor yang mempengaruhi Struktur Modal

Menurut Brigham dan Houston (2011:188-199) perusahaan umumnya dapat mempertimbangkan faktor – faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal sebagai berikut :

1. Stabilitas Penjualan

Perusahaan dengan penjualan relatif stabil akan dapat memenuhi kewajiban finansialnya dan memiliki aliran kas yang relatif stabil pula, maka dapat menggunakan utang lebih besar dari pada perusahaan dengan penjualan tidak stabil.

2. Struktur Aktiva

Perusahaan yang memiliki aset tetap dalam jumlah besar dapat menggunakan utang dalam jumlah besar, karena asset tersebut disebabkan karena banyaknya aset yang dapat dijadikan sebagai jaminan.

3. Operating Leverage

Tingkat Operating Leverage dapat menjelaskan kemampuan perusahaan dalam menggunakan biaya tetap untuk memperbesar jumlah pengaruh perubahan pada penjualan terhadap perubahan EBIT

4. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan faktor penting dalam menentukan struktur modal. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi tentu dapat memiliki dana internal yang lebih banyak dari pada perusahaan dengan profitabilitas rendah. Perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi akan berinvestasi menggunakan utang yang relatif kecil. Tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan dengan dana yang dihasilkan secara internal. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan lebih menggunakan laba ditahan dibanding dengan utang. Hal ini menunjukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan.

5. Tingkat Pertumbuhan

Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi pada umumnya dapat lebih bergantung pada modal eksternal, maka perusahaan yang meningkat dengan pesat cenderung lebih banyak menggunakan utang dari pada perusahaan dengan pertumbuhan yang relative lebih lambat.

6. Pajak

Perusahaan dapat menghemat pajak dari penggunaan utang karena Bunga utang dapat mengurangi pajak yang dibayar perusahaan, semakin tinggi tarif pajak maka semakin besar keuntungan dari penggunaan utang. Jadi, perlindungan pajak ini menjadi pertimbangan dalam penggunaan utang.

7. Ukuran Perusahaaan (*Firm Size*)

Perusahaan besar akan lebih mudah memperoleh modal dari pasar modal dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan ukuran perusahaan yang sering dijadikan sebagai indicator untuk kemungkinan terjadinya kebangkrutan bagi suatu perusahaan, dimana dalam ukuran perusahaan yang lebih besar dipandang lebih mampu menghadapi krisis untuk menjalankan usahanya. Perusahaan besar cenderung akan melakukan diversifikasi usaha lebih banyak dari pada perusahaan kecil. Oleh karena itu kemungkinan kegagalan dalam menjalankan usaha atau kebangkrutan akan lebih kecil. Ketika kemungkinan kegagalan bagi perusahaan kecil maka investor tertarik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut.

8. Kondisi *Intern* Perusahaan

Perusahaan akan mendapatkan saat yang tepat untuk menjual obligasi dan saham. Kondisi yang paling tepat saat menjual obligasi atau saham adalah pada saat tingkat bunga pasar sedang rendah dan pasar sedang optimis.

2.1.6 Rasio Manajemen Utang

Rasio Utang atau debt ratio adalah solvabilitas yang mengukur total kewajiban perusahan sebagai presentasi dari total asetnya.Dalam berkaitan dengan pengukuran rentabilitas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan membayar utang dalam jumlah utang yang terdapat pada neraca menunjukan seberapa besar modal pinjaman yang digunakan perusahaan dalam operasinya.

Rasio *Laverage* keuangan suatu perusahaan. Perusahaan dengan tingkat kewajiban yang lebih tinggi dibandingkan dengan asset dianggap memilki *leverage* yang tinggi dan lebih beresiko bagi pemberi pinjaman karena bunga dapat menjadi pengurang pajak, pengguna utang akan mengurangi kewajiban pajak dan menyisakan laba operasi yang lebih besar bagi investor, jika laba operasi sebagai presentase terhadap aset melebihi tingkat bunga atas utang seperti yang umumnya diharapkan, maka perusahaan dapat menggunakan utang untuk membeli aset, membayar bunga atas utang, dan masih mendapatkan sisanya sebagai bonus bagi pemegang saham. Berdasarkan laporan keuangan maka perhitungan rasio utang (pemeriksaan neraca untuk menentukan proporsi dana yang diwakili oleh utang) sebagai berikut yaitu:

2.1.6.1 Debt to Equity Ratio (DER)

Rasio ini menunjukan hubungan antara jumlah utang dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan, untuk dapat mengetahui tentang *Financial Laverage* perusahaan. Semakin tinggi rasio utang akan dapat menunjukan semakin besar pula utang yang digunakan dibandingkan dengan modal sendiri yang dimiliki. Untuk dapat mengukur presentase dana yang dapat dilakukan dengan cara membagi utang jangka panjang dengan ekuitas perusahaan.

2.1.6.2 Long Term Debt to Ratio (LDAR)

Rasio hutang jangka panjang mengukur seberapa besar kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan dalam menjamin utangnya dengan jumlah aset yang dimiliki. Semakin tinggi rasio hutang jangka panjang berarti akan semakin besar pula jumlah utang yang digunakan dalam menghasilkan keuntungan dibanding dengan aset yang dimiliki.

2.1.7 Manajemen Laba

2.1.7.1 Pengertian Manajemen Laba

Manajemen laba adalah pilihan manajer dalam menentukan kebijakan akuntansi untuk dapat mencapai suatu tujuan khusus (Rahmawati, 2015). Manajemen laba dapat digunakan untuk membuat laporan keuangan yang baik. Adanya keuangan yang baik tentu saja dapat membuat para investor lebih tertarik untuk membeli saham diperusahaan tersebut karena dapat dinilai memiliki kinerja perusahaan yang lebih baik.

Menurut Hidayat (2016) mendefinisikan manajemen laba adalah *intervensi* yang dapat dilakukan dengan cara disengaja oleh pihak manajemen dalam proses penentuan laba, dan biasanya akan dilakukan untuk kepentingan pribadi. Manajemen laba akan terjadi ketika manajer menggunakan *judgement* dalam melakukan laporan keuangan suatu perusahaan dan penyusunan transaksi. Untuk mengubah suatu laporan keuangan dan mengharapkan manfaat dari tindakan tersebut. Perbuatan ini dikategorikan sebagai kecurangan karena secara sadar dilakukan manajer perusahaan agar *stakeholder* yang ingin mengetahui kondisi ekonomi perusahaan tertipu karena memperoleh informasi yang tidak sesuai.

Manajemen laba adalah suatu usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk memanipulasi angka-angka kepada pihak eksternal dengan tujuan untuk keuntungan bagi dirinya sendiri dengan cara mengubah atau mengabaikan standar akuntansi yang telah ditetapkan, sehingga menyajikan informasi yang tidak sebenarnya (KURNIAWAN, 2020).

2.1.7.2 Motivasi Manajemen Laba

Secara umum terdapat beberapa hal yang dapat memotivasi badan usaha untuk melakukan tindakan *Creative Accounting* atau manajemen laba, yaitu dengan cara sebagai berikut:

1. Adanya Motivasi Bonus

Dalam melakukan perjanjian bisnis pemegang saham akan memberikan sejumlah insentif dan bonus sebagai *feedback* atau evaluasi atas kinerja manajer dalam menjalankan operasional terhadap suatu perusahaan. Insentif ini diberikan dalam jumlah yang relatif tetap secara rutin. Sedangkan bonus yang relatif lebih besar nilainya hanya akan dapat diberikan ketika kinerja manajer berada di area pencapaian bonus yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Kinerja manajer salah satunya dapat diukur dari pencapaian laba usaha. Pengukuran kinerja berdasarkan laba dan skema bonus tersebut memotivasi para manajer untuk memberikan performa terbaiknya sehingga tidak menutup peluang mereka untuk dapat melakukan tindakan manajemen laba agar dapat menampilkan kinerja perusahan yang baik demi mendaptkan bonus yang maksimal.

2. Adanya Motivasi Utang

Dalam melakukan kontrak bisnis dengan pemegang saham, sebagai kepentingan ekspansi perusahaan, manajer seringkali dapat melakukan beberapa kontrak bisnis dengan pihak ketiga, yaitu sebagai kreditor. Kreditor dapat menginvestasikan dananya pada perusahaan, tentunya manajer harus dapat menunjukan performa yang lebih baik pada perusahaannya. Untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal, yaitu dengan cara pinjaman dalam jumlah yang sangat besar agar perilaku kreatif dari manajer dapat menampilkan performa yang sangat baik dari laporan keuangan yang seringkali dapat muncul.

3. Adanya Motivasi Pajak

Tindakan manajemen laba tidak hanya terjadi pada perusahaan *go public* dan selalu untuk kepentingan harga saham, tetapi juga untuk kepentingan

perpajakan. Kepentingan yang didominasi oleh perusahaan yang belum *go public*. Perusahaan yang belum *go public* cenderung akan lebih cepat melaporkan dan menginginkan untuk menyajikan laporan laba fiskal yang lebih rendah dari nilai yang sebenarnya. Kecenderungan ini memotivasi manajer untuk bertindak kreatif melakukan tindakan manajemen laba agar seolah – olah laba fiskal yang dilaporkan memang lebih rendah tanpa melanggar aturan dan kebijakan akuntansi perpajakan.

4. Adanya Motivasi Initial Public Offering (IPO)

Motivasi ini banyak digunakan pada suatu perusahaan yang akan go public ataupun sudah go public. Perusahaan yang akan *go public* akan melakukan penawaran saham pendananya ke publik atau lebih dikenal dengan istilah *Initial Public Offering* (IPO) untuk memperoleh tambahan modal usaha dari calon investor. Begitupun dengan perusahaan yang sudah go public untuk kelanjutan dan ekspansi usahanya.

5. Diadakannya motivasi Pergantian Direksi

Praktik manajemen laba biasanya akan terjadi pada sekitar periode pergantian direksi atau *chief executive officer* (CEO). Menjelang berakhirnya masa jabatan, direksi cenderung bertindak kreatif dengan memaksimalkan laba agar performa kinerjanya akan lebih maksimal dan terlihat baik pada tahun terakhir ia menjabat. Motivasi utama yang akan mendorong hal tersebut adalah untuk memperoleh bonus yang lebih maksimal pada akhir masa jabatannya.

6. Adanya Motivasi Politis

Motivasi ini biasanya sering terjadi pada perusahaan besar yang bidang usahanya banyak menyentuh masyarakat luas, seperti perusahaan – perusahaan strategis semisal perminyakan, gas, listrik, dan air. Demi menjaga agar tetap mendapatkan subsidi, perusahaan – perusahaan tersebut cenderung menjaga posisi keuangannya dalam keadaan tertentu sehingga prestasi atau kinerjanya tidak terlalu baik karena jika sudah baik, kemungkinan besar subsidi tidak lagi diberikan.

Dari hasil penjelasan yang diuraikan diatas terdapat adanya beberapa motivasi yang mendorong terjadinya manajemen laba, namun hasil yang sama dengan penelitian ini yaitu ditinjau dari motivasi perpajakan (*Taxation Motivation*). *Scott* berpendapat bahwa motivasi pajak dapat menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata. Namun kewenangan pajak cenderung lebih memaksakan aturan akuntansi pajak itu sendiri untuk menghitung pendapatan kena pajak. Seharusnya secara umum perpajakan tidak mempunyai peran besar dalam keputusan manajemen laba. Dapat disimpulkan bahwa manajer termotivasi melakukan manajemen laba untuk menurunkan laba demi mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.

2.1.7.3 Pola Manajemen Laba

Menurut *Scott* (2015) ada empat pola manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan yaitu :

1. Taking a Bath

Manajemen laba dengan pola *taking a bath* biasanya akan dilakukan dengan cara perusahaan melakukan reorganisasi termasuk saat pergantian CEO. *Taking a bath* dilakukan dengan melaporkan rugi yang besar pada periode saat ini.

2. *Income Minimization* (Menurunkan Laba)

Income Minimization adalah pola manajemen laba yang sama dengan taking a bath namun dalam bentuk yang berbeda dan tidak terlalu ekstrim. Income minimization dapat dilakukan dengan memilih kebijakan yang dapat meminimalkan laba seperti penghapusan beberapa aset dan intangible asset, beban pemasaran, dan beban R&D.

3. *Income Maximization* (Menaikan Laba)

Manajer dapat melakukan *income maximization* dengan tujuan untuk meningkatkan laba pada perusahaan agar bisa mencapai *bogey* dalam skema bonus. Namun *income maximization* yang dilakukam akan berhenti ketika sudah mencapai target yang ada dalam skema bonus.

4. *Income Smoothing* (Meratakan Laba)

Income smoothing adalah pola yang sangat menarik dalam melakukan manajemen laba. Manajer akan melakukan *income smoothing* diantara bogey dan cap. Skema bonus dapat memberikan insentif bagi manajemen untuk mempertahankan laba diantara bogey dan cap.

2.1.7.4 Teknik Manajemen Laba

Manajemen laba dapat dilakukan dengan cara tiga teknik yaitu sebagai berikut:

1. Perubahan metode akuntansi

Manajemen dapat mengubah metode akuntansi yang berbeda dengan metode sebelumnya sehingga dapat menaikan atau menurunkan angka laba. Metode akuntansi dapat memberikan peluang bagi manajemen untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda misalnya:

- a. Mengubah metode depresiasi aktiva tetap ke dalam metode jumlah angka tahun (sum of the year digit) ke metode depresiasi garis lurus (stright line).
- b. Mengubah periode depresiasi.

2. Memberikan kebijakan perkiraan akuntansi

Manajemen dapat mempengaruhi laporan keuangan dengan cara memainkan kebijakan perkiraan akuntansi. Hal tersebut dapat memberikan peluang bagi manajemen untuk melibatkan subjektifitas dalam menyusun estimasi, misalnya:

- a. Dapat memberikan kebijakan mengenai perkiraan jumlah piutang yang tidak tertagih
- b. Dapat memberikan Kebijakan mengenai perkiaraan biaya garansi
- c. Dapat memberikan kebijakan mengenai perkiraan terhadap proses pengadilan yang belum terputuskan
- 3. Menggeser kepada periode biaya atau pendapatan.

Manajemen dapat menggeser periode biaya atau pendapatan yang sering disebut juga dengan keputusan operasional, misalnya sebagai berikut:

- a. Mempercepat atau menunda terjadinya pengeluaran sebagai penelitian dan pengembangan sampai periode akuntansi berikutnya.
- b. Mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai dengan periode yang akan datang.
- c. Kerjasama dengan vendor agar dapat mempercepat atau menunda pengiriman tagihan sampai dengan periode akuntansi yang akan dating.
- d. Menjual investasi sekuritas sebagai alat untuk dapat memanipulasi tingkat laba.
- e. Mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak terpakai

2.1.7.5 Teknik Pendeteksian Manajemen Laba

Pada penelitian ini, manajemen laba dideteksi dengan menggunakan discretionary accrual yang diukur menggunakan model yang dikembangkan oleh Friedlan (2013). Secara umum penelitian tentang manajemen laba menggunakan pengukuran berbasis akrual dalam mendeteksi ada tidaknya manipulasi. Salah satu kelebihan dalam pendekatan total accrual adalah pendekatan tersebut berpotensi untuk mengungkapkan cara – cara untuk menurunkan atau menaikan laba, karena cara – cara tersebut kurang mendapat perhatian untuk diketahui pihak luar. Total Accrual dalam perhitungan laba terdiri atas non discretionary dan discretionary accrual, non discretionary accrual merupakan komponen akrual yang terjadi secara alami atau wajar seiring dengan perubahan aktivitas perusahaan. Sedangkan discretionary accrual merupakan komponen akrual yang berasal dari rekayasa manajemen (earnings management). Sesuai penelitian yang dilakukan oleh Gumanti (2014), umumnya poin awal dalam pengukuran disrectionary accruals adalah total accruals, dimana total accruals tersebut terdiri dari komponen non discretionary accruals dan discretionary accruals. Selanjutnya model yang dikembangkan Friedlan (2013) digunakan untuk mengukur discretionary accruals. Model pengukuran atas *discretionary accruals* pada penelitian ini dijelaskan dengan formula sebagai berikut :

$$TA = NOI - CF0$$

Keterangan:

• TA : Total Accruals

• NOI : Net Operating Income

• CFO: Cash Flow Operating Activities

Kemudian dapat diukur discretionary accruals dengan cara menggunakan persamaan :

Keterangan:

• DACpt : Discretionary accruals periode tes

Tapt : Total accruals periode tes
 SALEpt : Penjualan periode tes

TApd : Total *accruals* periode dasarSALEpd : Penjualan periode dasar

Didalam melakukan pendeteksian ada tidaknya manipulasi laba, pada dasarnya akan dapat ditemukan dua jenis disrectionary accruals, yaitu disrectionary accurals negatif dan positif. Disrectionary accruals positif menggambarkan manipulasi yang dilakukan manajer dengan menggunakan pola income increasing, sedangkan negatif akan menunjukan manipulasi income decreasing, sebagai bentuk discretionary accruals tersebut maka akan dapat disesuaikan dengan cara motivasi yang akan dilakukan oleh manajer.

2.1.8 Pajak Penghasilan Badan

2.1.8.1 Pengertian Pajak Penghasilan Badan

Pengertian pajak penghasilan badan yaitu pajak yang dapat dikenakan dalam suatu subyek pajak atas penghasilan yang dapat diterima dan dapat diperoleh dalam kurun waktu tahunan pajak yang dapat pula dikenakan pajak dalam penghasilan tahunan pajak, apabila kewajiban pajak subyeknya dapat dimulai atau dapat berakhir dalam tahunan pajak.

Dasar hukum pajak penghasilan adalah undang – undang Nomor 36 Tahun 2008 Tanggal 23 September 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4893, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985) yang merupakan perubahan keempat atas undang – undang Nomor 7 tahun 1983 tanggal 31 Desember 1983 tentang pph, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263.

2.1.8.2 Subjek Pajak Penghasilan

Pengertian subjek Pajak Penghasilan adalah suatu individu yang dapat dikenakan pajak.Di dalam undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang dapat menjadi subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai salah satu bentuk kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan bentuk usaha tetap (BUT) Penjelasan dari masing – masing subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut

A. Orang Pribadi

Subjek pajak penghasilan yang mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun luar Indonesia.

B. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Dalam hal ini, warisan yang belum terbagi sebagai salah satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti yang dapat menggantikan mereka yang berhak sebagai ahli waris atau sebagai penunjuk warisan tersebut dimaksudkan agar pengenalan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut dapat dilaksanakan, demikian juga dengan tindakan penagihan selanjutnya.

C. Badan

Pengertian badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi, Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, Lembaga, dan Dana Pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

D. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Yang dimaksud dengan BUT adalah bentuk usaha yang dapat dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonessia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (Seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (Dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Berupa, Cabang perusahaan, Kantor Perwakilan, Pabrik, Bengkel, dan Proyeksi Konstruksi Instalasi atau proyek perakitan.

2.1.8.3 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan adalah penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dari mekanisme aliran pertambahan kemampuan ekonomis, penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dapat dikatagorikan atas empat sumber, yaitu :

A. Penghasilan yang dapat diterima dan diperoleh dari pekerjaan berdasarkan suatu hubungan kerja dan pekerjaan bebas.

- B. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
- C. Penghasilan dari Modal
- D. Penghasilan lain seperti hadiah, pembebasan hutang dan sebagainya.

 Berdasarkan kategori di atas, sesuai dengan pasal 4 ayat (1) undang undang PPh yang telah diberikan dan dapat diuraian sebagai berikut:
 - A. Penggantian atau imbalan berkenan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang undang PPh.
 - B. Hadiah dari hasil undian dan pekerjaan atau kegiatan seperti penghargaan
 - C. Laba Usaha
 - D. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta

2.1.8.4 Tarif Wajib Pajak Badan

Sesuai dengan diberlakukannya UU No. 36 Tahun 2008, tarif PPh WP Badan terdiri dari 3 (tiga) tarif, yaitu tarif sesuai Pasal 17 ayat (2a) UU PPh, tarif sesuai Pasal 17 ayat (2b) UU PPh, dan tarif sesuai Pasal 31E UU PPh.

A. Tarif Pasal 17 Ayat (2a) UU PPh

Tingginya tarif PPh yaitu 25 % (dua puluh lima persen) dan sudah diberlakukan pada Tahun 2010. Tarif PPh ini adalah tarif yang relatif umum dan hanya berlaku bagi semua WP Badan, khususnya WP Badan yang tidak dapat memenuhi syarat Pasal 17 ayat (2b) maupun Pasal 31E UU PPh.

B. Tarif Pasal 17 Ayat (2b) UU PPh

Bagi WP Badan yang berbentuk Perseroan Terbuka (Tbk atau *go public*), untuk dapat pengurangan tarif sebesar 5% (lima persen) dari tarif normal atau dengan kata lain mulai Tahun 2010, tarif untuk WP Badan yang sudah mencapai go public adalah 20% (dua puluh persen).

C. Tarif Pasal 31E UU PPh

Besarnya tarif PPh menurut pasal adalah 50% (lima puluh persen) dari tarif umum yang disebutkan pada pasal 17 ayat (1) huruf b atau Pasal 17 ayat (2b) UU PPh. Dengan kalimat lain, ada diskon dan tarif PPh sehingga tarif yang dapat dikenakan kepada WP Badan dapat memenuhi syarat sebesar 14% (untuk tahun pajak 2009) atau 12,5% (mulai tahun pajak 2010). WP Badan yang berhak mendapatkan fasilitas adalah WP Badan yang jumlah peredaran bruto dalam satu Tahun Pajak tidak lebih dari Rp 50 miliyar. Cara penghitungannya dapat dilihat pada memori penjelasan Pasal 31E UU PPh.

2.2 Review Penelitian Terdahulu

Terkait hasil dalam penelitian ini, penulis telah mereview beberapa penelitian terdahulu yang dapat berhubungan dengan variabel-variabel yang dibahas oleh peneliti yaitu, LDAR, DER, dan Manajemen Laba. Hasil dari review penelitian adalah sebagai berikut:

Mahardika (2014) melakukan penelitian tentang Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Periode 2006 – 2010. Metode analisis yang dapat digunakan adalah analisis statistik deskriptif, Uji asumsi klasik, dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas dan autokorelasi. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Dan akan dilakukan uji hipotesis yaitu uji T, uji F dan uji koefisien determinasi. Variabel bebas terdiri dari *Long Term Debt to Asset Ratio* dan *Debt to Equity Ratio* serta Variabel terikat yaitu Pajak Penghasilan Badan Terutang. Hasil penelitian menunjukan bahwa *Long Term Debt to Asset Ratio* dan *Debt to Equity Ratio* secara parsial dan bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Pajak penghasilan badan terutang.

Mulyadi & Anwar (2017), Global Conference on Contemporary Issues in Education, GLOBE-EDU 2014,12-14 July 2014, Corporate Governance, Earnings Management and Tax Management. Peneliti menggunakan discretionary accrual

untuk dapat mengukur manajemen laba, dan tarif pajak yang lebih efektif sebagai ukuran manajemen pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari *corporate governance* terhadap manajemen laba dan manajemen pajak. Untuk pengujian pertama menggunakan *GAAP ETR*, peneliti menemukan bahwa semua variabel berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak sebesar 1%, hanya kompensasi nilai perusahaan yang dapat berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba (kompensasi dewan signifikan pada 5%, dan nilai perusahaan signifikan dalam 1%). Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa beberapa bagian tata kelola perusahaan secara signifikan dapat mempengaruhi manajemen pajak dan manajemen laba. Kompensasi dewan dan independen secara konsisten (baik dalam *GAAP ETR* dan *Current ETR*) menunjukan bahwa korelasi bersifat negatif terhadap manajemen pajak. Sedangkan untuk jumlah pengurus ditemukan korelasi yang bersifat positif terhadap manajemen perpajakan dengan menggunakan *Current* ETR.

Yorke et al., (2018), International Journal Management Practice, Vol. 9, (No. 2) 2016, The Effects of Earning Management and Corporate Tax Avoidance on Firm Value. Penelitian ini menganalisis implikasi dari manajemen laba dan penghindaran pajak pada suatu nilai perusahaan. Menggunakan sampel perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Ghana selama sepuluh tahun (2003 – 2012), studi ini terfokus pada dua masalah terkait yaitu pertama dapat menganalisis hubungan antara manajemen laba (Earning Management) dan penghindaran pajak perusahaan (Corporate Tax Avoidance). Kedua dapat menguji pengaruh interaksi antara dua variabel terhadap suatu nilai perusahaan. Hasil ini menunjukan bahwa banyak aktivitas EM di suatu sampel perusahaan dalam hal ini manajer dapat menggunakan teknik penghindaran untuk mengelola laba. Analisis sensitivitas menunjukan bahwa, meskipun terdapat pengaruh positif dan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan, pengaruhnya tidak signifikan untuk dapat mengimbangi dampak negatif dari manajemen laba, sehingga menghasilkan pengaruh negatif secara keseluruhan terhadap nilai perusahaan.

Basit & Irwan (2019), International Journal of Accounting & Business Management Vol. 5 (No. 2), November, 2017, The Impact of Capital Structure on Firms Performance: Evidence from Malaysian Industrial Sector – A Case Based Approach. Statistik deskriptif dan regresi berganda dapat digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data. Dalam memilih 50 perusahaan produk industri yang terdaftar di Bursa Malaysia berdasarkan laporan tahun 2011 - 2015 digunakan teknik convenience sampling. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Debt to Equity Ratio, Total Debt Ratio, dan Total Equity Ratio. Sementara variabel terikat adalah Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE) dan Earning Per Share (EPS). Hasil regresi ditemukan Debt to Equity yang berpenaruh negatif, Total Debt Ratio dan Total Equity Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Debt to Equity berpengaruh negatif, Total Debt Ratio berpengaruh positif dan Total Equity Ratio berpengaruh signifikan negatif, Total Debt Ratio berpengaruh signifikan positif, dan Total Debt Ratio berpengaruh signifikan positif, dan Total Debt Ratio berpengaruh signifikan positif, dan Total Debt Ratio berpengaruh signifikan terhadap EPS.

Nisa et al., (2018) meneliti tentang Pengaruh Profitabilitas dan Manajemen Laba terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. Sampel yang digunakan sebanyak 63 data meliputi 21 perusahaan manufaktur dalam 3 tahun periode. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, uji autokolerasi), analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis (uji t) dan uji koefisien determinasi R2. Variabel bebas *Gross Profit Margin*, *Net Profit Margin* dan Manajemen Laba serta variabel terikat meliputi pembiayaan pajak penghasilan badan terutang. Hasil uji t pada model regresi, menunjukan variabel *Gross Profit Margin* berpengaruh signifikan dengan arah koefisien positif, dan untuk *Net Profit Margin* tidak berpengaruh signifikan dengan arah koefisien positif, dan untuk Manajemen Laba berpengaruh signifikan dengan arah koefisien positif terhadap variabel Pajak Penghasilan Badan Terutang.

Laksono (2019) meneliti tentang Pengaruh Struktur Modal (*Leverge, Debt to Equity Ratio, Long Term Debt to Asset Ratio*), *Profitabilitas*, & Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar BEI Periode Tahun 2015 – 2017. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dan dari hasil populasi yaitu sebanyak 144 perusahaan manufaktur, berhasil diolah sebanyak 42 sampel perusahaan berdasarkan hasil metode purposive sampling dimana peneliti menerapkan beberapa kriteria. Hasil analisis menyatakan bahwa variabel struktur modal (*Leverage, Debt to Equity Ratio*), biaya operasional, dan profitabilitas berpengaruh, akan tetapi variabel struktur modal (*Long Term Debt to Asset Ratio*) menyatakan tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.

Widyaningsih & Horri (2013) meneliti tentang pengaruh Manajemen Laba, *Debt to Equity Ratio*, dan *Return On Asset* terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Studi Kasus Pada Perusahaan manufaktur yang Terdaftar Dalam BEI Sektor *Real Estate* dan Properti Tahun 2015 – 2016. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dan populasi dari hasil penelitian ini adalah 51 perusahaan *real estate* dan properti. Proses pengambilan sampel yang digunakan metode purposive sampling dan teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan SPSS. Variabel bebas Manajemen *Laba*, *Debt to Equity Ratio*, *Return On Asset*, dan Variabel terikat Pajak Penghasilan Badan Terutang. Hasil uji t menyatakan bahwa Manajemen Laba tidak berpengaruh signifikan, sedangkan *Debt to Equity Ratio* dan *Return On Asset* berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.

Azis (2017) Penelitiannya yang berjudul ''Pengaruh Return On Asset (ROA), Debt To Equity Ratio (DER), Tingkat suku bunga dan tingkat inflasi terhadap Pajak penghasilan Badan Terutang di Bursa Efek Indonesia tahun 2003-2010'', Variabel independen dalam penelitian ini adalah Return on Asset (ROA), Debt To Equity Ratio (DER), Tingkat suku bunga dan tingkat inflasi sedangkan variable dependen yaitu Pajak Penghasilan Badan Terutang. Teknik Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan statistic (regresi linier berganda dengan

menggunakan SPSS versi 19). Secara parsial hasil penelitian menunjukan bahwa variable Return on Asset (ROA) berpengaruh positif, Debt to equity (DER) berpengaruh negative dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang.

2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1 Long Term Debt to Asset Ratio terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Long Term Debt to Asset Ratio adalah rasio yang mengukur tingkat - tingkat kewajiban jangka panjang dibandingkan dengan total modal . manfaat yang dapat diambil dari rasio ini yaitu, Untuk mengetahui besaran hutang jangka panjang perusahaan dan modal usaha yang dikeluarkan dan rasio ini juga dipakai investor untuk pertimbangan akuntansi. Penggunaan hutang oleh perusahaan dapat menimbulkan biaya bunga yang harus dibayarkan secara periodik kepada investor dan kreditor. Peraturan perpajakan memperlakukan biaya bunga sebagai bagian dari biaya usaha. Oleh karena itu, semakin besar bunga hutang perusahaan maka pajak terutangnya akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha. Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Gustin (2017), yang menyatakan dalam hasil penelitiannya bawa Long Term Debt to Asset Ratio berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Namun berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Yasinta (2018) dalam pengujiannya yang dilakukan secara simultan Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Secara parsial Long Term Debt to Asset Ratio lebih dominan dalam mempengaruhi pajak penghasilan badan terutang.

2.3.2 Debt to Equity Ratio terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Debt to Equity Ratio adalah salah satu rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas. Semakin tinggi rasio berarti semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham. Peraturan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia membedakan perlakuan biaya bunga pinjaman dengan pengeluaran dividen, bunga pinjaman dapat digunakan sebagai pengurang biaya (tax deductible). Pendanaan yang dominan berasal dari hutang akan

menimbulkan biaya berupa bunga hutang yang tinggi, hal ini akan berdampak pula pada besaran pajak perusahaan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Laksono (2019), Widyaningsih & Horri (2019), Simamora & Mahardika (2015), Sucipto & Hasibuan (2020) tentang pengaruh *Debt to Equity Ratio* terhadap pajak penghasilan badan terutang yang menunjukan hasil bahwa DER (*Debt to Equity Ratio*) memiliki pengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

2.3.3 Manajemen Laba terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Manajemen laba merupakan upaya untuk merekayasa dan menyembunyikan serta mengubah angka dalam laporan keuangan dengan cara memainkan metode dan prosedur akuntansi yang telah digunakan di dalam perusahaan. Perpajakan menjadi motivasi bagi manajer untuk melakukan manajemen laba, yaitu dengan cara memperkecil taxable income dalam rangka mengurangi pajak. Metode akuntansi adalah metode yang dapat digunakan oleh pihak manajemen dalam rangka penghematan pajak. Dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nisa et al., (2018) menunjukan bahwa hasil Manajemen Laba berpengaruh signifikan dengan arah koefisien positif terhadap variabel Pajak Penghasilan Badan Terutang. Namun tetap berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyaningsih & Horri (2019) tentang Pengaruh Manajemen Laba, Debt To Equity Ratio, dan Return On Asset terhadap PPh Badan Terutang, yang menunjukan hasil bahwa variable manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel PPh Badan Terutang sehingga hipotesis ditolak.

2.4 Pengembalian Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian yaitu pendapatan atau kesimpulan yang sifatnya sementara. Hipotesis penelitian dapat diuji melalui penganalisisan data yang dapat berpengaruh positif maupun negatif. Dalam penelitian ini penulis menjabarkan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Long Term Debt to Asset Ratio berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.

H₂ : *Debt to Equity Ratio* berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang

H₃: Manajemen Laba berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Hasil uraian diatas tentang pengaruh hipotesis penelitian maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian

